



POLA KONSUMSI DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN PROVINSI BALI 2013



<http://bali.bps.go.id>

**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI**





POLA KONSUMSI DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN PROVINSI BALI 2013



POLA KONSUMSI DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN PROVINSI BALI 2013

ISSN : 2356-4652
Katalog BPS : 3206001.51
Nomor Publikasi : 51520.1408
Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : xii + 63 halaman
Naskah : BPS Provinsi Bali

Tim Penyusun Naskah :

- Penanggung Jawab Umum : Panusunan Siregar
- Penanggung Jawab Teknis : Indra Susilo
- Koordinator : A A Gede Dirga Kardita
- Anggota : Rando Carrolina

Penyunting : Bidang Statistik Sosial
Gambar Kulit : Bidang Integrasi Pengolahan & Diseminasi Statistik
Diterbitkan Oleh : BPS Provinsi Bali

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Publikasi “Pola Konsumsi dan Distribusi Pendapatan Provinsi Bali 2013”, memuat beberapa indikator terkait dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Beberapa hal dibahas dalam publikasi ini meliputi rata-rata pengeluaran per kapita per bulan, pola konsumsi, dan distribusi pendapatan penduduk Provinsi Bali. Ketiga indikator tersebut secara umum mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk Provinsi Bali.

Diharapkan dari publikasi “Pola Konsumsi dan Distribusi Pendapatan Provinsi Bali 2013” ini, dapat dijadikan sebagai alat monitoring dan evaluasi bagi pelaksanaan pembangunan, serta sebagai pedoman bagi perencanaan pembangunan di masa mendatang.

Akhirnya kritik dan saran dari pemerhati kami tunggu sebagai masukan/perbaikan seri publikasi selanjutnya.

Denpasar, Desember 2014
Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
Kepala,



Panusunan Siregar



PANGAWEJANG STATISTIK

1. Membangun itu sulit, tetapi jauh lebih sulit melaksanakan pembangunan tanpa dukungan data statistik.
2. Data yang baik, akurat, bebas bias, dan terpercaya adalah data yang dikumpulkan berdasarkan metodologi statistik yang jelas dan benar.
3. Jangan pernah mengharapkan bahwa setiap data yang dikumpulkan itu, seratus persen benar sekalipun metodologi statistiknya sudah benar, karena data itu masih dikumpulkan oleh manusia.
4. BPS dalam setiap melakukan pengumpulan data, memiliki prinsip bahwa data yang dikumpulkan itu pasti mengandung kesalahan, tetapi dalam melaporkan dan mendiseminasikan datanya BPS tidak melakukan kebohongan.
5. Data bagaikan Kompas dan Pelita.

copyright@panusunan_siregar

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	iii
PANCAWEJANG STATISTIK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penulisan	3
1.3. Sumber Data	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II. METODOLOGI.....	5
2.1. Ruang Lingkup	5
2.2. Kerangka Sampel.....	5
2.3. Rancangan Sampel	6
2.4. Metode Pengumpulan Data.....	7
2.5. Pengolahan Data	7
2.6. Metode Analisis.....	8
2.6.1. Gini Ratio.....	8
2.6.2. Kriteria Bank Dunia.....	9
2.6.3. Kurva Lorenz.....	10
BAB III. KONSEP DAN DEFINISI	13
BAB IV. PEMBAHASAN	15
4.1. Pengeluaran per Kapita Penduduk	15
4.2. Pola Konsumsi Penduduk.....	20
4.2.1. Konsumsi Makanan.....	25
4.2.2. Konsumsi Non Makanan	31
4.3. Distribusi Pendapatan.....	36
4.3.1. Distribusi Pendapatan Provinsi Bali.....	37
4.3.2. Distribusi Pendapatan Menurut Kabupaten/Kota	41
BAB V. PENUTUP	47
LAMPIRAN.....	49

<http://bali.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.	Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Klasifikasi Daerah, Provinsi Bali Tahun 2011—2013.....	16
Tabel 2.	Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan, Provinsi Bali Tahun 2013	18
Tabel 3.	Pengeluaran Rata-rata per Kapita per Bulan Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Pengeluaran, Provinsi Bali Tahun 2011—2013	22
Tabel 4.	Rata-Rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Kelompok dan Jenis Pengeluaran, Provinsi Bali Tahun 2013	25
Tabel 5.	Proporsi Pengeluaran per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Sub Kelompok Makanan dan Klasifikasi Daerah, Provinsi Bali Tahun 2013	28
Tabel 6.	Persentase Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Sub Kelompok Makanan dan Kelompok Pengeluaran, Provinsi Bali Tahun 2013	30
Tabel 7.	Proporsi Pengeluaran per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Sub Kelompok Non Makanan dan Klasifikasi Daerah, Provinsi Bali Tahun 2013	33
Tabel 8.	Persentase Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Sub Kelompok Non Makanan dan Kelompok Pengeluaran, Provinsi Bali Tahun 2013	35
Tabel 9.	Gini Ratio Menurut Klasifikasi Daerah, Provinsi Bali Tahun 2013.....	38
Tabel 10.	Distribusi Pendapatan Menurut Klasifikasi Daerah dan Kriteria Bank Dunia, Provinsi Bali Tahun 2013.....	39
Tabel 11.	Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2011—2013.....	43

Tabel 12.	Distribusi Pendapatan Menurut Kabupaten/Kota dan Kriteria Bank Dunia, Provinsi Bali Tahun 2011 dan 2013	44
Tabel 13.	Rata-Rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pengeluaran, Provinsi Bali Tahun 2013.....	51
Tabel 14.	Rata-Rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran, Kabupaten Jembrana Tahun 2013	52
Tabel 15.	Rata-Rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran, Kabupaten Tabanan Tahun 2013	53
Tabel 16.	Rata-Rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran, Kabupaten Badung Tahun 2013.....	54
Tabel 17.	Rata-Rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran, Kabupaten Gianyar Tahun 2013	55
Tabel 18.	Rata-Rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran, Kabupaten Klungkung Tahun 2013	56
Tabel 19.	Rata-Rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran, Kabupaten Bangli Tahun 2013.....	57
Tabel 20.	Rata-Rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran, Kabupaten Karangasem Tahun 2013.....	58
Tabel 21.	Rata-Rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran, Kabupaten Buleleng Tahun 2013	59
Tabel 22.	Rata-Rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran, Kota Denpasar Tahun 2013.....	60

Tabel 23.	Rata-Rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Jenis Kelompok Komoditi Makanan, Provinsi Bali Tahun 2013	61
Tabel 24.	Rata-Rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Jenis Kelompok Komoditi Non Makanan, Provinsi Bali Tahun 2013	62
Tabel 25.	Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita Sehari Menurut Kelompok Bahan Makanan, Provinsi Bali Tahun 2011—2013	63

<http://bali.bps.go.id>

<http://bali.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 1. Kurva Lorenz	11
Gambar 2. Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2013	17
Gambar 3. Persentase Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Makanan dan Non Makanan, Provinsi Bali Tahun 2013	23
Gambar 4. Proporsi Pengeluaran per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Sub Kelompok Makanan, Provinsi Bali Tahun 2013.....	26
Gambar 5. Proporsi Pengeluaran per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Sub Kelompok Non Makanan, Provinsi Bali Tahun 2013.....	32
Gambar 6. Distribusi Pendapatan Menurut Klasifikasi Daerah, Provinsi Bali Tahun 2013	41
Gambar 7. Distribusi Pendapatan Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2013	45

<http://bali.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap negara di dunia memiliki tujuan utama, yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyatnya melalui peningkatan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi adalah upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada.

Pembangunan ekonomi dalam jangka panjang bertujuan untuk mencapai peningkatan pendapatan per kapita, kesempatan kerja yang luas, mengurangi perbedaan perkembangan pembangunan dan kemakmuran antar daerah, serta merubah struktur perekonomian supaya tidak berat sebelah. Pembangunan pada hakikatnya tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akan tetapi juga memberikan penekanan kepada aspek penambahan tingkat pendapatan masyarakat dan aspek pemerataan.

Sementara itu, tingkat pendapatan masyarakat dapat tercermin dari tingkat pendapatan per kapitanya. Pendapatan per kapita ini secara langsung akan mencerminkan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap individu, yang selanjutnya akan digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik makanan ataupun non makanan. Semakin tinggi pendapatan per kapita penduduk suatu daerah, tentu diharapkan semakin baik tingkat kesejahteraan penduduk di daerah tersebut.

Pola pengeluaran dapat juga dipakai sebagai proksi dari pendapatan yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk dan perubahan komposisinya sebagai indikasi perubahan tingkat kesejahteraan. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan pengeluaran/konsumsi masyarakat untuk menghitung pendapatan per kapita penduduk. Hal ini didasarkan pada paradigma bahwa bila pendapatan mengalami kenaikan, maka akan diikuti oleh pengeluaran konsumsi yang semakin tinggi pula. Sebab, bukanlah hal yang mudah untuk mengumpulkan data mengenai jumlah pendapatan yang diterima oleh penduduk. Umumnya masyarakat masih enggan untuk memberikan informasi mengenai jumlah pendapatan yang mereka terima.

Mengukur tingkat kesejahteraan penduduk hanya dari sisi tingkat pendapatan per kapita tidaklah cukup. Tingginya tingkat pendapatan penduduk suatu daerah tidak secara langsung mencerminkan tingginya tingkat kesejahteraan penduduk dari seluruh daerah tersebut. Pada kenyataannya, pendapatan antara individu yang satu dengan individu lainnya tidaklah selalu seragam. Bahkan terdapat ketimpangan yang cukup mencolok antara penduduk yang kaya dengan yang miskin. Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan ekonomi antar penduduk adalah dengan menghitung distribusi pendapatan.

Penghitungan distribusi pendapatan yang dilakukan oleh BPS, didasarkan pada data pengeluaran/konsumsi masyarakat yang dikumpulkan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). BPS menggunakan tiga metode untuk mengetahui distribusi pendapatan penduduk, yaitu Koefisien Gini Ratio, Kriteria Bank Dunia, dan Kurva Lorenz.

Ketiga indikator tersebut diharapkan dapat dijadikan dasar perencanaan bagi pembangunan di masa mendatang sehingga secara nyata mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk Provinsi Bali pada

khususnya, dan penduduk Indonesia pada umumnya. Di samping itu, ketiga indikator tersebut dapat menjadi alat kontrol dan evaluasi terhadap proses pembangunan yang telah berjalan selama ini.

Proses pengumpulan data memang tidak mudah, bahkan bisa dikatakan data itu mahal. Walaupun demikian, akan jauh menjadi lebih mahal jika proses pembangunan dilakukan tanpa data. Mengingat pentingnya indikator-indikator tersebut bagi peningkatan kualitas penduduk selaku obyek pembangunan, maka selaku subyek, penduduk diharapkan senantiasa berpartisipasi dalam setiap tahapan pembangunan. Salah satunya dengan memberikan informasi yang benar ketika menjadi responden dari sensus atau survei yang diselenggarakan oleh BPS.

1.2. Tujuan Penulisan

Penyusunan publikasi ini, pada dasarnya bertujuan untuk memberikan data dan informasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan para konsumen data mengenai indikator tingkat kesejahteraan penduduk Provinsi Bali tahun 2013.

Secara khusus, tujuan dari penyusunan publikasi ini, antara lain

- a. Mengetahui pola konsumsi penduduk Provinsi Bali,
- b. Mengetahui distribusi pendapatan penduduk Provinsi Bali, dan
- c. Mengetahui ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Bali.

1.3. Sumber Data

Data pola konsumsi dan distribusi pendapatan Provinsi Bali tahun 2013 bersumber dari data hasil Susenas tahun 2013. Susenas merupakan survei triwulanan yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial ekonomi dengan cakupan yang relatif luas. Pelaksanaan Susenas dilaksanakan secara serempak di seluruh Indonesia. Untuk Provinsi Bali, sampelnya tersebar di sembilan kabupaten/kota yang mencakup seluruh kecamatan, baik wilayah perkotaan dan perdesaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Publikasi "Pola Konsumsi dan Distribusi Pendapatan Provinsi Bali 2013" ini disajikan secara sistematis dalam lima bab, yaitu

BAB I. PENDAHULUAN, meliputi Latar Belakang, Tujuan Penulisan, dan Sumber Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. METODOLOGI, meliputi Ruang Lingkup, Kerangka Sampel, Rancangan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Pengolahan Data, dan Metode Analisis.

BAB III. KONSEP DAN DEFINISI, meliputi berbagai Konsep dan Definisi yang digunakan dalam publikasi ini.

BAB IV. PEMBAHASAN, meliputi Pengeluaran per Kapita Penduduk, Pola Konsumsi Penduduk, Distribusi Pendapatan Provinsi Bali, dan Distribusi Pendapatan Menurut Kabupaten/Kota.

BAB V. KESIMPULAN, meliputi Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pembahasan.

LAMPIRAN

BAB II

METODOLOGI

2.1. Ruang Lingkup

Data sosial ekonomi sangat dibutuhkan untuk mengetahui gambaran proses dan pencapaian hasil pembangunan sebagai bahan umpan balik bagi para ahli dan pengambil kebijakan pembangunan. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2013 digunakan sebagai bahan analisis dalam publikasi "Pola Konsumsi dan Distribusi Pendapatan Provinsi Bali 2013". Pendataan Susenas 2013 dilaksanakan secara triwulanan, yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi data yang dihasilkan dan sejalan dengan peningkatan frekuensi permintaan data.

Susenas 2013 dilaksanakan di seluruh wilayah geografis Indonesia dengan ukuran sampel sebesar 300.000 rumah tangga yang terbagi dalam daerah perkotaan maupun perdesaan. Sementara itu, untuk Provinsi Bali, sampelnya tersebar pada sembilan kabupaten/kota mencakup seluruh kecamatan, baik wilayah perkotaan maupun perdesaan, dengan jumlah sampel sebanyak 5.760 rumah tangga, dalam 576 blok sensus.

2.2. Kerangka sampel

Kerangka sampel yang digunakan untuk pemilihan responden terdiri dari dua jenis, yaitu kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus, dan kerangka sampel untuk pemilihan rumah tangga dalam blok sensus terpilih. Kerangka sampel blok sensus daerah perkotaan/perdesaan adalah daftar blok sensus yang terdapat di daerah perkotaan/perdesaan pada setiap

kabupaten/kota dari hasil sensus penduduk 2010 (SP 2010). Sementara itu, kerangka sampel untuk pemilihan rumah tangga adalah daftar rumah tangga hasil pemutakhiran daftar hasil SP 2010 dengan menggunakan Daftar VSEN12.P. Kemudian, di pilih sepuluh rumah tangga sebagai rumah tangga sampel terpilih pada setiap blok sensus.

2.3. Rancangan Sampel

Pencacahan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2013 dilaksanakan setiap triwulan. Data yang dikumpulkan triwulanan selama setahun akan digunakan untuk memperkirakan (estimasi) sampai tingkat kabupaten/kota. Metode pengambilan sampel dilakukan dua tahap. Tahap pertama, dari kerangka sampel blok sensus dipilih sejumlah blok sensus secara *Probability Proportional to Size* (PPS)¹ – *Linear Systematic Sampling* dengan *size* banyaknya rumah tangga hasil *listing* di setiap blok sensus hasil Sensus Penduduk 2010. Tahap kedua, dari sejumlah rumah tangga hasil *update* di setiap blok sensus terpilih dipilih sebanyak 10 rumah tangga secara *Linear Systematic Sampling*².

¹ *Proportional Probability to Size* (PPS) adalah salah satu desain pengambilan sampel, dimana probabilita setiap unit sampel ditentukan oleh besarnya *size* unit sampel tersebut. Dalam hal ini unit sampelnya blok sensus dengan *size* banyaknya rumah tangga tiap blok sensus. Semakin banyak rumah tangga dalam suatu blok sensus maka probabilita terpilihnya blok sensus tersebut sebagai sampel semakin besar

² *Linear Systematic Sampling* adalah metode pengambilan sampel dengan menggunakan angka kelipatan tertentu setelah unit sampel diurutkan berdasarkan kriteria tertentu. Dalam hal ini unit sampelnya adalah rumah tangga (dalam satu blok sensus) yang diurutkan berdasarkan pendidikan terakhir kepala rumah tangga. Dimaksudkan supaya sampel yang terpilih meliputi semua kelompok pendidikan terakhir.

2.4. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan, maka pengumpulan data dari rumah tangga terpilih dilakukan melalui wawancara langsung dengan responden. Wawancara dilakukan terhadap kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga yang dianggap mengetahui keadaan rumah tangga bersangkutan.

Referensi waktu survei yang digunakan adalah selama seminggu yang lalu untuk konsumsi makanan, dan sebulan yang lalu untuk konsumsi bukan makanan.

Data pokok yang digunakan dalam penghitungan dan analisis distribusi pendapatan adalah pengeluaran rumah tangga, bukan pendapatan rumah tangga. Jadi, data pendapatan rumah tangga dihitung dengan menggunakan pendekatan data pengeluaran rumah tangga. Hal ini dilakukan mengingat pengumpulan data pendapatan rumah tangga sangat sulit dikumpulkan oleh petugas lapangan.

Masalah pendapatan rumah tangga biasanya dirahasiakan oleh responden sehingga data pendapatan yang diperoleh cenderung *under estimate*. Berbeda halnya jika responden ditanyakan mengenai pengeluaran rumah tangga, informasi yang diperoleh cukup mendekati kebenaran. Oleh karena itu, acuan analisis yang digunakan dalam publikasi ini didasarkan pada data pengeluaran rumah tangga penduduk.

2.5. Pengolahan Data

Pada dasarnya pengolahan data dilakukan melalui dua proses, yaitu proses manual dan proses komputer. Proses manual meliputi kegiatan pengecekan awal atas kelengkapan isian daftar pertanyaan, penyuntingan (*editing*) terhadap isian yang tidak wajar, termasuk hubungan keterkaitan

(konsistensi) antara jawaban yang satu dengan jawaban yang lain, serta proses pemberian kode-kode (*coding*). Proses komputer meliputi perekaman data (*data entry*), tabulasi, pemeriksaan konsistensi antar isian dalam kuesioner, dan proses komputer lanjutan seperti tabulasi.

2.6. Metode Analisis

Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan. Dalam publikasi ini, distribusi pendapatan diukur dari nilai konsumsi rumah tangga penduduk, sedangkan untuk mengukur pemerataan pendapatan digunakan metode Gini Ratio, Ukuran Bank Dunia, dan Kurva Lorenz. Ketiga metode ini dipakai mengingat bahwa keduanya banyak digunakan di berbagai negara maupun daerah lain di Indonesia, sehingga hasil penghitungan ini bisa dibandingkan dengan penghitungan di daerah lain dan atau dengan negara lain.

2.6.1. Gini Ratio

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah Gini Ratio. Nilai gini ratio berkisar antara nol dan satu. Bila gini ratio sama dengan nol berarti distribusi pendapatan sangat merata karena setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Namun, jika gini ratio sama dengan satu berarti terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang sempurna karena seluruh pendapatan hanya dinikmati oleh satu orang saja. Singkatnya, semakin tinggi nilai gini ratio, maka semakin timpang distribusi pendapatan suatu daerah. Sebaliknya, semakin rendah nilai gini ratio berarti semakin merata distribusi pendapatannya.

Harry T. Oshima memberikan batasan mengenai Koefisien Gini, sebagai berikut

- a. Bila koefisien Gini terletak antara 0,50 dan 1 maka ketimpangan pembagian pendapatan dikatakan tinggi.
- b. Bila koefisien Gini terletak antara 0,35 dan 0,50 maka ketimpangan pembagian pendapatan dikatakan sedang.
- c. Bila koefisien Gini terletak dibawah 0,35 maka ketimpangan pembagian pendapatan dikatakan rendah.

Rumus untuk menghitung gini ratio adalah

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i (Q_i + Q_{i-1})}{10.000}$$

dengan

G : Gini ratio,

P_i : Persentase rumah tangga/penduduk pada kelompok pendapatan ke-(i),

Q_i : Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelompok ke-(i),

Q_{i-1} : Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelompok ke-(i - 1), dan

K : Banyaknya kelompok pendapatan.

2.6.2. Kriteria Bank Dunia

Bank Dunia membagi penduduk menurut kelompok pendapatan menjadi tiga kelompok pendapatan, yaitu kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah, kelompok 40 persen penduduk berpendapatan menengah, dan kelompok 20 persen penduduk berpendapatan tinggi.

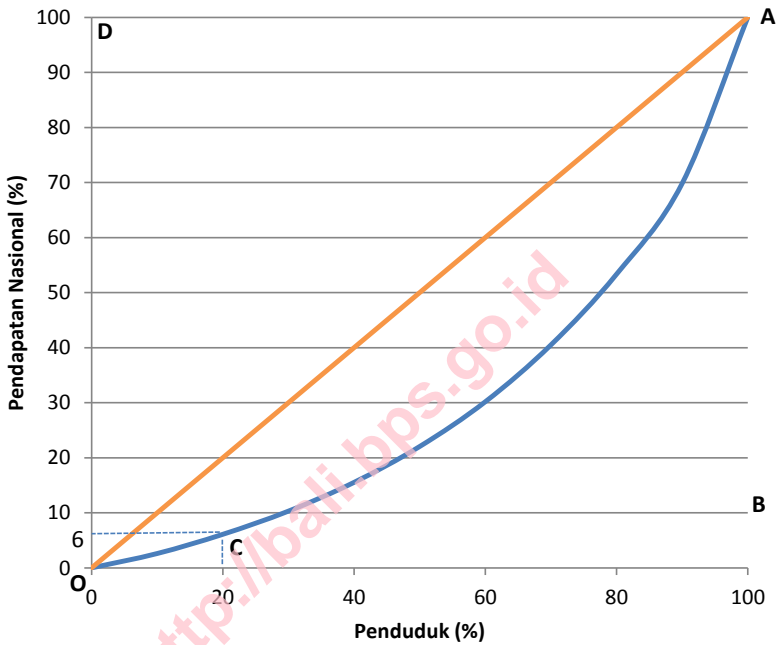
Dalam melihat pemerataan pendapatan, Bank dunia memfokuskan perhatiannya pada perkembangan pendapatan kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah saja. Pemerataan diukur berdasarkan persentase pendapatan yang diterima kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah.

- a. Apabila kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah menerima kurang dari 12 persen jumlah pendapatan, maka dikatakan pemerataan rendah atau ketimpangan distribusi pendapatan tinggi.
- b. Apabila kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah menerima 12 hingga 17 persen jumlah pendapatan, maka dikatakan pemerataan sedang atau ketimpangan distribusi pendapatan sedang.
- c. Apabila kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah menerima lebih dari 17 persen jumlah pendapatan, maka dikatakan pemerataan tinggi atau ketimpangan distribusi pendapatan rendah.

2.6.3. Kurva Lorenz

Ukuran Koefisien Gini biasanya divisualisasikan dalam bentuk kurva Lorenz. Pada kurva Lorenz diperlihatkan hubungan antara penduduk sebagai penerima pendapatan dan jumlah pendapatan yang diterima. Kurva Lorenz digambarkan pada satu segi empat sama sisi, dimana sumbu horizontal menunjukkan persentase jumlah penduduk sedangkan sumbu vertikal menunjukkan persentase jumlah pendapatan yang diterima.

Gambar 1.
Kurva Lorenz.



dengan

OD : Persentase kumulatif pendapatan,

OB : Persentase kumulatif penduduk,

OA : Diagonal Gini

C : menunjukkan bahwa 20 persen penduduk menikmati sekitar 6 persen pendapatan. Idealnya adalah 20 persen. Singkatnya, makin jauh garis OCA dari diagonal OA makin senjang tingkat pendapatan penduduk.

<http://bali.bps.go.id>

BAB III

KONSEP DAN DEFINISI

Blok Sensus (BS) adalah bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan yang membagi habis suatu desa/kelurahan tersebut dan merupakan daerah kerja dari seorang pencacah. Blok sensus mempunyai batas-batas yang jelas dan mudah dikenali, baik batas alam maupun buatan yang diperkirakan tidak akan berubah dalam jangka waktu sepuluh tahun. Pada umumnya BS mencakup sekitar 80—120 rumah tangga atau bangunan fisik bukan tempat tinggal atau dapat juga merupakan gabungan dari keduanya.

Klasifikasi daerah adalah karakteristik yang membedakan lokasi daerah menurut indikator komposit yang telah ditetapkan, klasifikasi daerah dibedakan menjadi dua, yaitu daerah perkotaan dan perdesaan.

Pengeluaran/konsumsi rumah tangga sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga sebulan untuk konsumsi rumah tangga.

Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun non makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain. Konsumsi makanan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan makanan termasuk makanan jadi, rokok, dan tembakau. Konsumsi non makanan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk biaya perumahan, pendidikan, kesehatan, aneka barang dan jasa, pakaian, dan barang tahan lama tanpa memperhatikan asal barang. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu yang lalu, sedangkan untuk konsumsi bukan makanan dihitung selama sebulan yang lalu. Konsumsi makanan dan

non makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan.

Distribusi pendapatan adalah banyaknya pendapatan yang diterima oleh masing-masing rumah tangga/penduduk suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Dalam penelitian ini distribusi pendapatan diukur dari nilai konsumsi rumah tangga/penduduk.

Pola konsumsi adalah kecenderungan rumah tangga/penduduk membelanjakan pendapatannya dalam upaya memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga/penduduk tersebut, baik konsumsi makanan maupun bukan makanan.

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan adalah seluruh biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga sebulan oleh semua anggota rumah tangga di bagi jumlah anggota rumah tangga.

Gini Rasio adalah rasio dari suatu ukuran pemerataan atau ketimpangan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Pengeluaran per Kapita Penduduk

Besarnya pengeluaran penduduk dapat dijadikan sebagai indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk, yaitu dengan mengetahui kemampuan daya belinya. Artinya, jika terjadi peningkatan kemampuan daya beli pada masyarakat, maka akan meningkatkan pula kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Semakin tinggi tingkat pendapatan akan memberikan keleluasaan bagi penduduk untuk melakukan proses konsumsi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, penduduk dengan tingkat pendapatan yang kecil, kegiatan konsumsinya pun akan lebih terbatas lagi.

Perkembangan pengeluaran per kapita per bulan penduduk Provinsi Bali terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan Tabel 1 dapat dikaji bahwa selama periode 2011—2013, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Provinsi Bali mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, pengeluaran per kapita per bulan penduduk Provinsi Bali sebesar Rp.760.456,00. Meningkat Rp.151.268,00 atau tumbuh sekitar 29,89 persen di tahun 2012 menjadi Rp.911.724,00. Sementara rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk di tahun 2013 sebesar Rp.994.070,00 meningkat sebesar Rp.82.346,00 atau tumbuh sebesar 9,03 persen dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini menggambarkan bahwa jika harga-harga tidak banyak berubah, kenaikan pengeluaran per kapita tersebut jelas menunjukkan adanya peningkatan daya beli penduduk. Peningkatan kemampuan tersebut memberi arti bahwa penduduk memiliki lebih banyak keleluasaan dalam menentukan pilihan untuk membelanjakan

pendapatannya dari tahun ke tahun menuju pemenuhan kebutuhan ke arah yang lebih baik.

Tabel 1. Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Klasifikasi Daerah, Provinsi Bali Tahun 2011—2013.

Klasifikasi Daerah	2011	Pertumbuhan (%)	2012	Pertumbuhan (%)	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan	898,037	19.56	1,073,654	8.72	1,167,282
Perdesaan	552,624	20.20	664,265	9.71	728,744
Bali	760,456	19.89	911,724	9.03	994,070

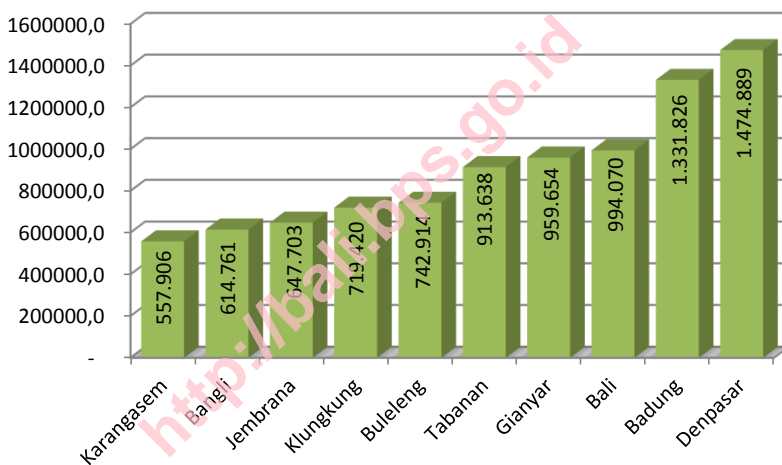
Sumber: BPS, Susenas 2011—2013

Pada Tabel 1 diperlihatkan juga mengenai rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Provinsi Bali menurut daerah tempat tinggal, perdesaan dan perkotaan. Selama periode 2011—2013, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk di perkotaan lebih besar dibandingkan di perdesaan. Kondisi ini terkait dengan lebih kompleksnya pengeluaran penduduk di perkotaan dibandingkan penduduk di perdesaan. Hasil Susenas 2013 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk yang tinggal di perkotaan mencapai Rp.1.167.282,00, sedangkan untuk daerah perdesaan hanya Rp.728.744,00.

Jika dilihat dari pertumbuhannya, ternyata rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk perdesaan meningkat lebih tinggi dari perkotaan. Pada periode 2011—2012 di perdesaan terjadi pertumbuhan sebesar 20,20 persen, sedangkan di perkotaan hanya meningkat sebesar 19,56 persen atau lebih rendah 0,65 poin. Hal yang sama terjadi pada periode 2012—2013, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduknya masing-masing meningkat 9,71 persen (perdesaan) dan 8,72 persen (perkotaan).

Tinggi rendahnya rata-rata pengeluaran per kapita per bulan selain menjadi tolok ukur tingkat kemakmuran penduduk juga dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kesejahteraan penduduk daerah satu dengan daerah lainnya. Gambar 2 menyajikan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Bali.

Gambar 2. Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2013.



Sumber: BPS, Susenas 2013.

Secara umum, Kota Denpasar memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan tertinggi di antara kabupaten lain di Bali, yaitu mencapai Rp.1.474.889,00. Selain Kota Denpasar, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan Kabupaten Badung lebih tinggi dari rata-rata pengeluaran per kapita per bulan Provinsi Bali, yaitu sebesar Rp.1.331.826,00. Tingginya nilai rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di dua wilayah tersebut menunjukkan bahwa kemakmuran serta kesejahteraan penduduknya lebih baik dibanding kabupaten lain di Provinsi Bali pada umumnya. Di sisi lain, Kabupaten Karangasem merupakan kabupaten dengan nilai rata-rata

pengeluaran per kapita per bulan terendah se-Bali, yaitu hanya mencapai Rp.557.906,00.

Perbandingan mengenai rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Provinsi Bali juga dapat dikaji berdasarkan persentase penduduk menurut kelompok pengeluaran, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2. Berdasarkan tabel tersebut ternyata terjadi pergeseran persentase penduduk ke kelompok rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang lebih tinggi, seiring dengan meningkatnya rata-rata pengeluaran per kapita penduduk.

Tabel 2. Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan, Provinsi Bali Tahun 2013.

Kabupaten/Kota	Kelompok Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan (Rupiah/Bulan)						
	100.000 s.d. 149.999	150.000 s.d. 199.999	200.000 s.d. 299.999	300.000 s.d. 399.999	400.000 s.d. 499.999	≥ 500.000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Jembrana	0,00	1,52	14,16	20,54	22,42	41,35	
Tabanan	0,00	0,46	3,61	14,50	14,30	67,13	
Badung	0,00	0,00	0,30	3,23	7,44	89,04	
Gianyar	0,00	0,12	0,42	8,58	14,89	75,99	
Klungkung	0,00	0,51	8,85	20,51	17,52	52,61	
Bangli	0,00	0,15	11,67	22,81	15,74	49,64	
Karangasem	0,08	2,01	17,26	26,93	14,66	39,06	
Buleleng	0,00	0,28	7,86	22,50	15,20	54,16	
Denpasar	0,00	0,20	0,21	4,23	5,91	89,45	
Bali	2013	0,01	0,48	5,40	13,57	12,53	68,01
	2012	0,09	0,81	9,10	14,69	11,52	63,80

Sumber: Bali, Susenas 2013.

Secara umum terjadi penurunan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di hampir semua kelompok pengeluaran pada periode 2012—2013, kecuali pada kelompok pengeluaran di atas Rp.400.000,00 atau lebih. Terdapat sekitar 80,54 persen penduduk yang rata-rata pengeluaran konsumsinya di atas Rp.400.000,00 atau meningkat 5,23 poin dibanding tahun sebelumnya. Penurunan tertinggi adalah pada kelompok rata-rata pengeluaran Rp.200.000,00 s.d. Rp.299.999,00 sebanyak 3,70 poin, yaitu dari 9,10 persen di tahun 2012 menjadi 5,40 persen di tahun berikutnya. Perubahan atau pergeseran persentase kelompok rata-rata pengeluaran penduduk dari kelompok rendah ke kelompok tinggi ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan seiring dengan meningkatnya kemampuan daya beli penduduk. Bisa dikatakan bahwa kondisi ini dapat menjadi indikator awal dari keberhasilan program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah.

Variasi persentase penduduk dengan kelompok pengeluaran juga terjadi di hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali. Dari Tabel 2 terlihat bahwa kelompok rata-rata pengeluaran Rp.500.000,00 atau lebih mendominasi besaran persentase penduduk di semua kabupaten/kota di Bali. Kota Denpasar menduduki urutan pertama, terdapat 89,45 persen penduduknya telah membelanjakan pendapatannya Rp.500.000,00 atau lebih, diikuti oleh Kabupaten Badung sebesar 89,04 persen. Sama halnya dengan kedua kabupaten/kota sebelumnya, Kabupaten Gianyar juga memiliki persentase kelompok rata-rata pengeluaran Rp.500.000,00 atau lebih yang lebih tinggi dari rata-rata Bali. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga wilayah tersebut memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik dibanding wilayah lain karena wilayah tersebut merupakan sentra pertumbuhan ekonomi di Pulau Bali.

Dari data yang disajikan pada Tabel 2, terlihat bahwa di Kabupaten Karangasem masih ada penduduk yang rata-rata pengeluarannya berada

pada kelompok rata-rata rendah (Rp.100.000,00—Rp.149.999,00), yaitu sebesar 0,08 persen. Selain itu, Kabupaten Karangasem juga merupakan kabupaten dengan persentase kelompok rata-rata pengeluaran per kapita per bulan Rp.500.000,00 atau lebih terendah di Bali.

4.2. Pola Konsumsi Penduduk

Pengaruh pendapatan terhadap konsumsi mempunyai hubungan yang sangat erat. Penghasilan seseorang merupakan faktor utama yang menentukan pola konsumsinya. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka patut diduga akan semakin baik pula pola konsumsinya. Hal ini dimungkinkan karena meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat. Yang dimaksud dengan pola konsumsi adalah kecenderungan rumah tangga atau penduduk membelanjakan pendapatannya dalam upaya memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga/penduduk tersebut, baik konsumsi makanan maupun non makanan.

Pola pengeluaran konsumsi penduduk dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran, maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Selain itu, dari data pengeluaran (sebagai proksi data pendapatan) dapat pula dihitung tingkat ketimpangan pendapatan penduduk suatu wilayah.

Pengeluaran yang dihitung dalam Susenas dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan konsumsi non makanan dihitung selama sebulan terakhir. Pengeluaran-pengeluaran tersebut selanjutnya dikonversi menjadi pengeluaran rata-rata sebulan.

Tingkat pemenuhan kebutuhan dua jenis pengeluaran tersebut pada dasarnya berbeda. Dalam kondisi pendapatan terbatas, kebutuhan makanan lebih didahulukan sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan, maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk non makanan.

Pergeseran komposisi dan pola pengeluaran tersebut terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan secara umum rendah, sedangkan elastisitas permintaan terhadap kebutuhan non makanan relatif lebih tinggi. Artinya, perubahan harga yang terjadi pada kelompok makanan, tidak akan terlalu mempengaruhi tingkat permintaan penduduk terhadap makanan. Berapapun harga makanan, penduduk senantiasa berusaha untuk membelinya. Berbeda halnya jika perubahan harga terjadi pada kelompok non makanan.

Tabel 3 menyajikan data pengeluaran rata-rata per kapita per bulan menurut daerah tempat tinggal dan jenis pengeluaran di Provinsi Bali periode tahun 2011—2013. Berdasarkan hasil olah Susenas 2013, pengeluaran rata-rata per kapita per bulan penduduk Bali sebesar Rp.994.070,00. Sebesar Rp.422.190,00 atau sebesar 42,47 persen dari total pengeluaran digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan non makanan.

Terlihat bahwa selama periode tahun 2011 hingga 2013 telah terjadi fluktuasi persentase pola konsumsi penduduk Bali. Secara umum persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan mengalami penurunan dari 41,85 persen di tahun 2011 menjadi 40,14 persen pada tahun 2011, namun kembali meningkat menjadi 42,47 persen di tahun 2013. Hal sebaliknya

terjadi pada pengeluaran untuk konsumsi non makanan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi penduduk Bali selama tiga tahun terakhir masih tergolong belum stabil mengingat persentase pengeluaran rata-rata untuk masing-masing jenis pengeluaran masih menunjukkan fluktuasi.

Tabel 3. Pengeluaran Rata-rata per Kapita per Bulan Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Pengeluaran, Provinsi Bali Tahun 2011—2013.

Daerah Tempat Tinggal	Jenis Pengeluaran					
	Makanan			Non Makanan		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan (Rupiah)	347.151	397.319	464.062	550.886	676.334	703.221
(%)	38,66	37,01	39,76	61,34	62,99	60,24
Perdesaan (Rupiah)	274.542	317.976	358.051	278.081	346.289	370.693
(%)	49,68	47,87	49,13	50,32	52,13	50,87
Bali (Rupiah)	318.230	365.936	422.190	442.226	545.788	571.880
(%)	41,85	40,14	42,47	58,15	59,86	57,53

Sumber: BPS, Susenas 2011—2013.

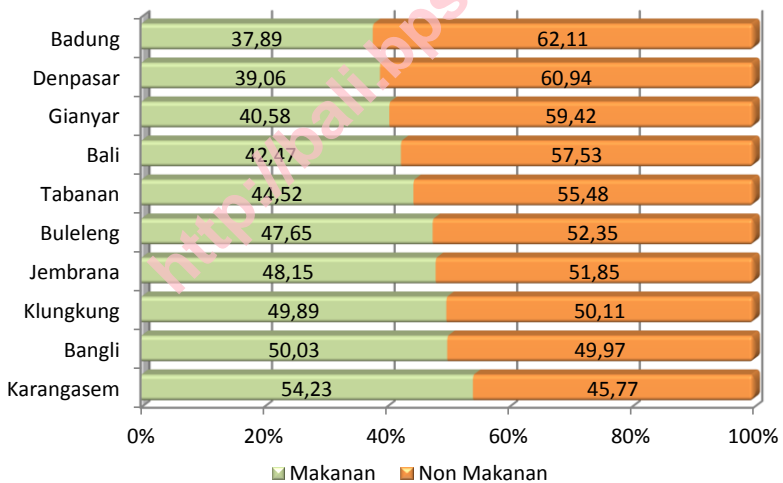
Jika dirinci lebih dalam, fluktuasi persentase pola konsumsi masyarakat Bali selama tiga tahun terakhir juga terjadi di daerah perkotaan dan perdesaan. Di daerah perkotaan tercatat bahwa dari tahun 2011 hingga tahun 2012 pola konsumsi makanan mengalami penurunan persentase, dari 38,66 persen (Rp.347.151,00) menjadi 37,01 persen (Rp.397.319,00) dan menanjak menjadi 39,76 persen (Rp.464.062,00) di tahun 2013. Hal ini bertolak belakang dengan fluktuasi persentase konsumsi non makanannya.

Kondisi yang sama pun terjadi di daerah perdesaan, yaitu terjadi fluktuasi persentase pola konsumsi masyarakat selama tiga tahun terakhir, meskipun jika dilihat dari besaran absolutnya menunjukkan angka yang

terus meningkat. Secara umum, jika dilihat dari proporsinya maka tingkat kesejahteraan penduduk daerah perkotaan lebih baik jika dibandingkan dengan perdesaan.

Bila dilihat menurut kabupaten/kota, terdapat variasi distribusi pengeluaran makanan dan non makanan yang cukup tinggi. Dari Gambar 3 berikut dapat dilihat bahwa secara regional, belum semua kabupaten/kota di Provinsi Bali memiliki pola konsumsi penduduk yang telah terkonsentrasi pada kelompok non makanan.

Gambar 3. Persentase Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Makanan dan Non Makanan, Provinsi Bali Tahun 2013.



Sumber: BPS, Susenas 2013.

Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Badung merupakan kabupaten/kota yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi makanan di bawah rata-rata pengeluaran makanan Provinsi Bali yang mencapai 42,47 persen. Tidak mengherankan jika ketiga wilayah ini memiliki persentase pengeluaran non makanan lebih besar dari wilayah lain, sebab

ketiga wilayah tersebut merupakan penggerak kegiatan ekonomi di Bali, terutama Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Dengan kata lain, ketiga wilayah ini memiliki tingkat kesejahteraan penduduk yang lebih baik dari wilayah lainnya.

Pergeseran pola konsumsi penduduk akan jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, dimana kenaikan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan non makanan ataupun untuk investasi dan ditabung. Menurut Hukum Engel (Ernest Engel, 1857), "Bila selera tidak berubah maka persentase pengeluaran untuk makanan akan menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan". Dengan ukuran yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, berdasarkan rata-rata pendapatannya, penduduk di suatu daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah, kelompok 40 persen penduduk berpendapatan menengah, dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Mengacu pada Hukum Engel, berarti pengeluaran untuk makanan pada kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah akan lebih besar dibandingkan pengeluaran untuk non makanan, dan berlaku sebaliknya untuk kelompok pendapatan yang lebih tinggi.

Proporsi pengeluaran makanan dan non makanan penduduk Provinsi Bali tahun 2013 berdasarkan kelompok pengeluarannya dapat dilihat pada Tabel 4. Pada tabel terlihat bahwa berdasarkan kelompok pengeluaran penduduk rata-rata pengeluaran untuk makanan mengalami penurunan, sedangkan untuk non makanan mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pendapatan penduduk. Pada kelompok pengeluaran 40% penduduk berpengeluaran rendah, lebih dari 50 persen pendapatannya digunakan untuk konsumsi makanan. Persentase ini kemudian menurun di kelompok 40% penduduk berpengeluaran menengah. Kondisi mendekati titik jenuh terjadi pada kelompok 20% penduduk berpengeluaran tinggi,

sekitar 67 persen dari pendapatannya digunakan untuk konsumsi non makanan atau hanya 32,43 persen pengeluarannya digunakan untuk konsumsi makanan. Dengan kata lain, persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan lebih rendah pada kelompok penduduk yang berpengeluaran menengah dan tinggi. Sebaliknya, pengeluaran untuk non makanan lebih tinggi pada kelompok yang sama.

Tabel 4. Rata-Rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Kelompok dan Jenis Pengeluaran, Provinsi Bali Tahun 2013.

Kelompok Pengeluaran Penduduk	Makanan		Non Makanan		Total	
	(Rupiah)	(Persen)	(Rupiah)	(Persen)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
40% penduduk berpengeluaran rendah	241.287	59,50	164.237	40,50	405.524	
40% penduduk berpengeluaran menengah	436.211	47,72	477.856	52,28	914.067	
20% penduduk berpengeluaran tinggi	755.753	32,43	1.574.569	67,57	2.330.323	
Bali	2013	422.190	42,47	571.880	57,53	994.070
	2012	365.936	40,14	545.788	59,86	911.724

Sumber: BPS, Susenas 2013.

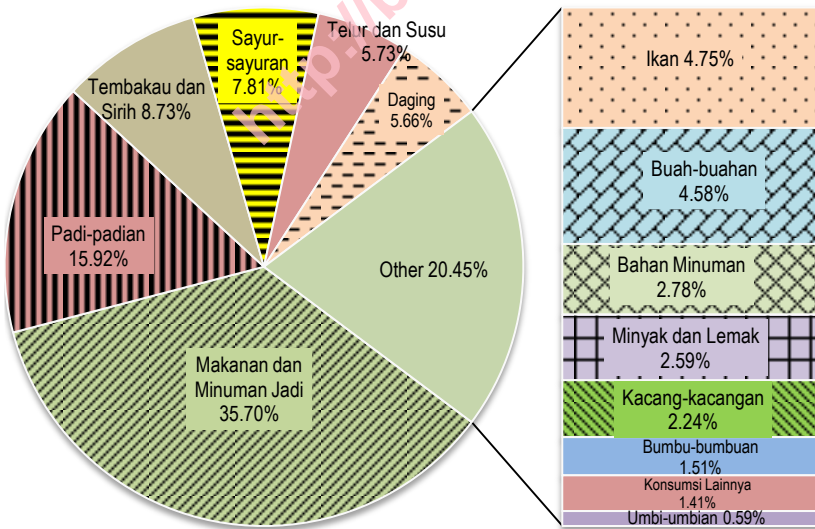
4.2.1 Konsumsi Makanan

Makanan memegang peranan penting bagi kelangsungan hidup manusia sehingga manusia akan melakukan berbagai upaya agar dapat mengkonsumsi makanan yang memadai. Konsumsi makanan akan bertambah seiring dengan peningkatan pendapatan. Namun, sampai pada titik jenuh tertentu, penambahan pendapatan akan digunakan untuk konsumsi non makanan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya elastisitas permintaan terhadap makanan.

Pengeluaran untuk kelompok makanan meliputi pengeluaran untuk konsumsi padi-padian, umbi-umbian, ikan/udang/cumi/kerang, daging, telur dan susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, bahan minuman, bumbu-bumbuan, konsumsi lainnya, makan dan minuman jadi, serta tembakau dan sirih.

Makanan yang dikonsumsi tersebut adalah makanan yang betul-betul dikonsumsi, baik berasal dari produksi sendiri, pembelian, maupun pemberian. Pengeluaran untuk makanan dihitung menggunakan *consumption approach*, artinya yang dihitung sebagai pengeluaran adalah yang sudah benar-benar dikonsumsi selama masa referensi. Dalam hal ini, referensi waktu yang BPS gunakan adalah jangka waktu seminggu yang lalu.

Gambar 4. Proporsi Pengeluaran per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Sub Kelompok Makanan, Provinsi Bali Tahun 2013.



Sumber: BPS, Susenas 2013.

Pengeluaran untuk makanan diklasifikasikan menjadi empat belas kelompok, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4. Terlihat bahwa pengeluaran untuk konsumsi makanan dan minuman jadi menempati proporsi tertinggi, sebesar 35,70 persen. Disusul konsumsi padi-padian dan umbi-umbian sebesar 16,51 persen. Meskipun persentasenya lebih rendah dari makanan dan minuman jadi, namun konsumsi komoditi jenis ini cenderung masih tinggi dan ke depan kebutuhan terhadap beras masih meningkat.

Untuk kelompok sumber protein (ikan, daging, telur dan susu) dikonsumsi penduduk sebesar 16,14 persen, sedangkan kelompok sayur-sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan memiliki proporsi sebesar 14,63 persen.

Jenis kelompok makanan yang dikonsumsi penduduk dengan persentase kurang dari 2 persen berturut-turut adalah bumbu-bumbuan (1,51 persen), dan konsumsi lain (1,41 persen).

Tabel 5 di bawah menggambarkan proporsi pengeluaran per kapita per bulan menurut kelompok makanan dan klasifikasi daerah, baik perkotaan maupun perdesaan. Perbedaan gaya hidup antara penduduk di daerah perkotaan dan perdesaan mengakibatkan perbedaan pola konsumsi makanan yang cukup signifikan di antara penduduk pada kedua daerah tersebut.

Di perkotaan, proporsi terbesar pada konsumsi makanan dan minuman jadi yang mencapai 41,18 persen. Kepraktisan dan kemudahan mengonsumsi kelompok tersebut lebih menjadi pertimbangan utama penduduk perkotaan membelanjakan pengeluarannya, disamping karena kesibukan dan terbatasnya waktu penduduk perkotaan. Kelompok pengeluaran tertinggi berikutnya untuk daerah perkotaan adalah kelompok

padi-padian, yaitu sebesar 12,863 persen, dan 8,11 persen untuk kelompok tembakau dan sirih.

Tabel 5. Proporsi Pengeluaran per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Sub Kelompok Makanan dan Klasifikasi Daerah, Provinsi Bali Tahun 2013.

Jenis Komoditi	Perkotaan (%)	Perdesaan (%)	Bali (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Padi-padian	12,86	22,01	15,92
Umbi-umbian	0,48	0,81	0,59
Ikan/udang/cumi/kerang	4,68	4,88	4,75
Daging	5,54	5,89	5,66
Telur dan Susu	6,26	4,69	5,73
Sayur-sayuran	6,97	9,48	7,81
Kacang-kacangan	2,18	2,36	2,24
Buah-buahan	4,42	4,89	4,58
Minyak dan Lemak	2,20	3,36	2,59
Bahan Minuman	2,37	3,60	2,78
Bumbu-bumbuan	1,38	1,75	1,51
Konsumsi Lainnya	1,36	1,50	1,41
Makanan dan Minuman Jadi	41,18	24,82	35,70
Tembakau dan Sirih	8,11	9,95	8,73
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2013.

Satu hal yang cukup menarik terjadi di daerah perdesaan pada tahun 2013 adalah bahwa terdapat pergeseran proporsi pengeluaran dari kelompok padi-padian menjadi konsumsi makanan dan minuman jadi yang mencapai 24,82 persen, melebihi konsumsi kelompok padi-padian, yaitu

sebesar 22,01 persen. Pengaruh makin maraknya produk-produk instan di masyarakat menjadi salah satu penyebab pergeseran pola konsumsi ini. Kecenderungan untuk bersikap lebih efisien dan praktis itulah yang mempengaruhi masyarakat umum untuk beralih mengkonsumsi jenis makanan dan minuman jadi.

Dari segi budaya, pergeseran ini dikhawatirkan menjadi pertanda bahwa masyarakat semakin menyukai hal-hal yang bersifat instan dan praktis. Selain itu, dari segi keamanan pangan, ada beberapa isu yang harus menjadi perhatian. Makanan jadi banyak digemari karena kepraktisannya. Teknologi pangan yang berkembang pesat telah memudahkan konsumen untuk menyantap beragam produk pangan kapan pun dengan cita rasa yang bervariasi.

Sementara itu, kelompok konsumsi tembakau dan sirih di perdesaan mencapai 9,95 persen sedikit lebih tinggi dibanding perkotaan. Begitu juga untuk kelompok konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan, proporsi pengeluaran di perdesaan melebihi konsumsi di perkotaan, yaitu sebesar 9,48 persen dan 4,89 persen. Tingginya persentase konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan di perdesaan diduga karena kemudahan penduduk perdesaan untuk memperoleh kedua jenis konsumsi makanan tersebut, selain harga yang lebih rendah tentunya.

Tabel 6 berikut menyajikan persentase rata-rata pengeluaran konsumsi makanan dilihat menurut kelompok rata-rata pengeluaran. Sama seperti tahun sebelumnya, kelompok pengeluaran terendah di tahun 2013 berada pada kelompok Rp.100.000,00—Rp.149.999,00 per kapita per bulan, kondisi ini mengalami peningkatan dari tahun 2009. Pada tahun 2009 masih terdapat penduduk yang berada pada kelompok pengeluaran konsumsi makanan di bawah Rp.99.000,00. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi peningkatan pendapatan di masyarakat. Dengan kata lain, tingkat

kesejahteraan penduduk di Provinsi Bali semakin membaik dari tahun ke tahun.

Tabel 6. Persentase Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Sub Kelompok Makanan dan Kelompok Pengeluaran, Provinsi Bali Tahun 2013.

Jenis Komoditi	Kelompok Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan (Rupiah/Bulan)						Total
	100.000 s.d. 149.999	150.000 s.d. 199.999	200.000 s.d. 299.999	300.000 s.d. 399.999	400.000 s.d. 499.999	≥ 500.000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Padi-padian	56,21	37,79	35,96	26,36	22,45	13,86	15,92
Umbi-umbian	0,00	2,37	1,29	0,87	0,69	0,53	0,59
Ikan/udang/cumi/kerang	3,14	4,55	5,52	5,75	5,48	4,57	4,75
Daging	0,00	0,13	2,48	3,53	4,54	6,04	5,66
Telur dan Susu	0,00	2,91	2,45	3,86	4,27	6,12	5,73
Sayur-sayuran	6,80	10,95	11,27	11,08	10,08	7,22	7,81
Kacang-kacangan	2,22	4,33	2,89	3,10	2,80	2,10	2,24
Buah-buahan	1,31	0,57	2,43	3,66	4,08	4,76	4,58
Minyak dan Lemak	2,61	4,33	4,06	4,15	3,61	2,32	2,59
Bahan Minuman	5,75	4,23	4,03	3,70	3,46	2,61	2,78
Bumbu-bumbuan	2,75	1,65	1,87	2,02	2,01	1,41	1,51
Konsumsi Lainnya	0,00	2,13	1,56	1,54	1,51	1,38	1,41
Makanan dan Minuman Jadi	19,22	19,67	16,72	22,30	25,27	38,35	35,70
Tembakau dan Sirih	0,00	4,33	7,47	8,07	9,75	8,72	8,73
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2013.

Menurut beberapa literatur dan tren data yang ada, terdapat indikasi bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan penduduk yang ditandai dengan semakin besarnya total pengeluaran, maka proporsi pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi padi-padian akan semakin kecil atau bisa dikatakan bahwa konsumsi penduduk pada kelompok padi-padian dan umbi-umbian akan mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya kelompok

pengeluaran. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 6, persentase konsumsi padi-padian semakin menurun seiring dengan peningkatan pendapatan.

Pengeluaran konsumsi jenis protein (ikan, daging, telur dan susu) meningkat secara signifikan sejalan dengan meningkatnya kelompok pengeluaran. Hal ini menyangkut kemampuan daya beli penduduk untuk membeli jenis komoditi tersebut mengingat harga sebagai pertimbangannya, selain faktor gizi sebagai penunjang kesehatan badan.

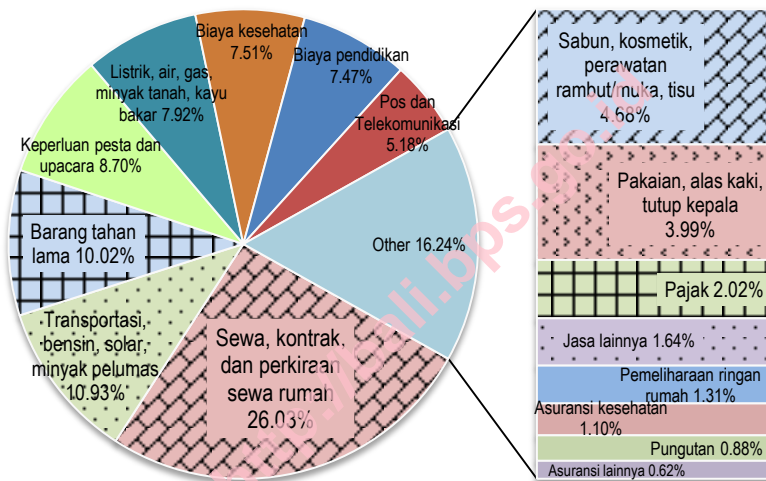
4.2.2. Konsumsi Non Makanan

Penghitungan pengeluaran non makanan dihitung menggunakan *delivery approach*. Artinya, yang dihitung sebagai konsumsi/pengeluaran adalah barang-barang yang sudah dibeli (meskipun belum lunas)/diperoleh/digunakan oleh anggota rumah tangga selama masa referensi (sebulan yang lalu dan setahun yang lalu). Pengeluaran non makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa, pakaian, alas kaki dan tutup kepala, barang tahan lama, pajak, pungutan dan asuransi, serta keperluan pesta dan upacara/kenduri. Secara garis besar, konsumsi non makanan di bagi menjadi enam sub kelompok, yaitu sub kelompok perumahan (terdiri dari pengeluaran untuk sewa, kontrak, imputasi sewa rumah, pengeluaran untuk pemeliharaan dan perbaikan ringan, pengeluaran listrik dan pengeluaran telepon), sub kelompok aneka barang dan jasa (terdiri dari sub kelompok sabun dan kosmetik, biaya kesehatan, biaya pendidikan, biaya transportasi dan jasa lainnya), sub kelompok pakaian, sub kelompok barang tahan lama, sub kelompok pajak, pungutan, dan asuransi, serta yang terakhir adalah sub kelompok pesta.

Pada dasarnya kebutuhan non makanan menjadi prioritas kedua bagi individu dalam pemenuhan kebutuhannya. Artinya, pengeluaran untuk konsumsi non makanan akan dilakukan setelah terpenuhinya kebutuhan

konsumsi makanan. Tahun 2013, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Provinsi Bali untuk kelompok non makanan mencapai Rp.571.880,00, meningkat sebesar Rp.26.092,00 atau sekitar 4,78 persen dibanding tahun 2012.

Gambar 5. Proporsi Pengeluaran per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Sub Kelompok Non Makanan, Provinsi Bali Tahun 2013.



Sumber: BPS, Susenas 2013.

Pengeluaran untuk perumahan masih menjadi kebutuhan yang utama sehingga menempati persentase tertinggi, yaitu 40,44 persen. Kondisi ini juga menggambarkan bahwa biaya pengeluaran untuk properti di Provinsi Bali memang cukup tinggi. Pengeluaran yang cukup tinggi berikutnya adalah kelompok aneka barang dan jasa, yaitu sebesar 32,23 persen. Biaya transportasi, baik untuk sekedar pembelian bahan bakar, perbaikan dan perawatan, maupun sewa kendaraanlah yang memberi sumbangan tertinggi pada kelompok jenis pengeluaran ini. Konsumsi untuk pembelian barang tahan lama menempati urutan tertinggi berikutnya, yaitu 10,02 persen, sedangkan pengeluaran untuk keperluan pesta dan upacara sebesar 8,70

persen. Tingginya persentase pada pengeluaran jenis ini disebabkan oleh mayoritas penduduk Bali menganut agama Hindu yang upacara dan ritual keagamaannya sangat kental dalam pelaksanaan menjalankan ibadahnya. Sementara kelompok non makanan yang menempati proporsi terendah adalah pengeluaran untuk kelompok pakaian, yaitu sebesar 3,99 persen.

Tabel 7. Proporsi Pengeluaran per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Sub Kelompok Non Makanan dan Klasifikasi Daerah, Provinsi Bali Tahun 2013.

Jenis Pengeluaran	Perkotaan	Perdesaan	Bali
(1)	(2)	(3)	(4)
Sewa, kontrak, imputasi sewa rumah	27,53	21,68	26,03
Pemeliharaan dan perbaikan ringan	1,60	0,45	1,31
Listrik	7,00	10,60	7,92
Telepon	5,47	4,35	5,18
Sabun dan kosmetik	4,59	4,93	4,68
Biaya kesehatan	7,06	8,82	7,51
Biaya pendidikan	8,29	5,10	7,47
Biaya transportasi	10,40	12,48	10,93
Jasa lainnya	2,04	0,45	1,64
Pakaian dan alas kaki	3,92	4,19	3,99
Barang tahan lama	9,88	10,42	10,02
Pajak	1,96	2,20	2,02
Pungutan dan retribusi	0,73	1,31	0,88
Asuransi Kesehatan	1,36	0,37	1,10
Asuransi lainnya	0,77	0,18	0,62
Pesta dan upacara	7,40	12,47	8,70
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2013.

Proporsi pengeluaran non makanan di daerah perkotaan dan perdesaan dapat dilihat pada Tabel 7 di atas. Pengeluaran untuk sewa, kontrak, dan imputasi sewa rumah memiliki proporsi terbesar, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Di daerah perkotaan, pengeluaran untuk sewa, kontrak, dan imputasi sewa rumah mencapai 27,53 persen sedangkan di daerah perdesaan mencapai 21,68 persen. Hal ini lebih disebabkan karena faktor harga yang berbeda. Harga sewa/imputasi sewa rumah di perkotaan lebih tinggi dari daerah perdesaan.

Jika dilihat dari pengeluaran untuk keperluan pesta dan upacara, persentase di perdesaan lebih tinggi 5,08 poin dari daerah perkotaan, yaitu sebesar 12,47 persen untuk perdesaan dan 7,40 persen untuk perkotaan. Hal ini disebabkan karena adat dan budaya di perdesaan masih lebih mengikat dibanding perkotaan.

Satu hal yang menarik adalah pada jenis pengeluaran listrik, untuk daerah perkotaan menunjukkan angka 7,00 persen sedangkan di daerah perdesaan justru lebih tinggi, yaitu mencapai 10,60 persen.

Tabel 8 di bawah menjelaskan tentang persentase rata-rata pengeluaran menurut kelompok pengeluarannya. Terlihat bahwa pola konsumsi non makanan untuk masing-masing kelompok pengeluaran cukup bervariasi. Pengeluaran untuk jenis komoditi sewa, kontrak, dan imputasi rumah hampir selalu menempati persentase tertinggi di setiap kelompok pengeluaran. Seperti terlihat pada tabel di atas, persentase pada kelompok terendah sebesar 34,58 persen sedangkan pada kelompok tertinggi memiliki persentase sebesar 25,94 persen. Tingginya persentase pengeluaran pada kelompok jenis ini disebabkan karena tingginya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk sewa, kontrak, dan imputasi rumah milik sendiri.

Tabel 8. Persentase Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Sub Kelompok Non Makanan dan Kelompok Pengeluaran, Provinsi Bali Tahun 2013.

Jenis Komoditi	Kelompok Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan (Rupiah/Bulan)						
	100.000 s.d. 149.999	150.000 s.d. 199.999	200.000 s.d. 299.999	300.000 s.d. 399.999	400.000 s.d. 499.999	≥ 500.000	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sewa, kontrak, perkiraan sewa rumah	34,58	32,34	25,47	26,27	28,00	25,94	26,03
Pemeliharaan dan perbaikan ringan rumah	0,00	4,91	0,12	0,43	0,24	1,39	1,31
Listrik, air, minyak tanah, kayu bakar	24,92	22,18	21,14	16,12	14,22	7,23	7,92
Rekening telepon rumah, dll	2,03	2,15	3,94	6,62	6,84	5,08	5,18
Sabun mandi/cuci, kosmetik, dll	7,46	8,10	8,57	6,93	6,48	4,48	4,68
Biaya kesehatan	5,59	3,50	4,72	4,57	4,13	7,78	7,51
Biaya pendidikan	0,00	5,35	5,19	5,82	6,28	7,60	7,47
Transportasi, bensin, dll	5,76	5,74	11,87	13,46	12,67	10,77	10,93
Jasa lainnya	0,00	0,00	0,17	0,23	0,39	1,75	1,64
Pakaian, alas kaki, dll	6,95	4,16	4,16	4,13	4,24	3,98	3,99
Barang tahan lama	0,00	0,88	1,68	2,31	2,82	10,67	10,02
Pajak	1,02	0,86	2,08	2,07	2,01	2,02	2,02
Pungutan	7,12	1,39	1,04	1,23	1,16	0,86	0,88
asuransi kesehatan	0,00	0,00	0,03	0,07	0,09	1,19	1,10
Asuransi lainnya	0,00	0,10	0,12	0,17	0,18	0,66	0,62
Keperluan pesta dan upacara	4,57	8,34	9,70	9,57	10,25	8,60	8,70
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2013.

Ada beberapa jenis komoditi yang meningkat secara signifikan seiring tingginya kelompok pengeluaran, di antaranya barang tahan lama, dan asuransi. Hal ini terkait dengan gaya hidup dan kebutuhan tersier yang meningkat di kelompok pengeluaran tinggi. Sementara itu ada beberapa jenis komoditi pengeluaran yang menurun seiring dengan tingginya kelompok pengeluaran, listrik, air, minyak tanah, dan kayu bakar. Kondisi ini

mengindikasikan bahwa di kelompok pengeluaran tinggi usaha untuk melakukan hemat energi semakin meningkat.

4.3. Distribusi Pendapatan

Setelah membahas tren rata-rata pengeluaran per kapita penduduk berikut pola konsumsinya, selanjutnya informasi yang dapat dikembangkan dari data pengeluaran adalah mengenai pola distribusi pendapatan yang dapat menggambarkan kondisi ketimpangan yang terjadi. Sebab, pembangunan yang sedang berjalan bukan merupakan tujuan, melainkan hanya sebagai alat dalam proses untuk menurunkan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Jadi, berkurangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan inti dari pembangunan. Distribusi pendapatan pada dasarnya merupakan suatu konsep mengenai penyebaran pendapatan di antara setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat.

Selama pertumbuhan ekonomi dan hasil-hasil dari pembangunan dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat, maka masalah ketidakmerataan distribusi pendapatan tidak akan muncul. Jika kinerja ekonomi lebih baik atau mengalami kemajuan, maka seluruh rakyat juga harus merasakan dampak kemajuan tersebut dalam bentuk naiknya pendapatan. Dengan kata lain, diharapkan terjadi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Peningkatan kualitas hidup penduduk menjadi sasaran akhir dari pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, maupun bidang pembangunan lainnya. Salah satu bidang pembangunan yang cukup berperan bagi peningkatan kualitas hidup penduduk adalah pembangunan di bidang ekonomi. Keberhasilan Provinsi Bali di bidang perekonomian salah satunya tercermin

dalam pertumbuhan ekonomi yang tetap stabil pada kisaran antara 5—6 persen selama lima tahun terakhir. Tercatat pada triwulan tiga tahun 2013, ekonomi di Bali tumbuh sebesar 5,97 persen yang didorong oleh seluruh sektor ekonomi yang ada, dengan persentase terbesar penyokongnya adalah konsumsi rumah tangga, yaitu sebesar 57,67 persen.

Pertumbuhan ekonomi tersebut juga membawa akibat pada menurunnya tingkat pengangguran. Pada Agustus 2013, tingkat pengangguran hanya 1,83 persen, turun sekitar 0,25 persen dari Agustus tahun sebelumnya, yaitu sebesar 2,08 persen dengan tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 74,93 persen.

Tak dapat dipungkiri bahwa kuantitas penduduk memberi pengaruh besar pada naiknya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Namun, penduduk yang besar lagi berkualitas menjadi harapan bagi proses jalannya pembangunan sebab penduduk dalam hal ini tidak menjadi beban dalam pembangunan.

4.3.1 Distribusi Pendapatan Provinsi Bali

Hasil Susenas tahun 2013 menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi di Provinsi Bali sudah tergolong dalam kategori menengah, yaitu terletak pada interval 0,35 dan 0,50, atau lebih tepatnya adalah 0,403. Pada Tabel 9 terlihat bahwa indeks gini rasio mengalami penurunan dari 0,430 di tahun 2012 menjadi 0,403 di tahun 2013. Tentunya hal ini seperti yang diharapkan sebab pada dasarnya peningkatan pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakatnya secara menyeluruh di setiap lapisan.

Tabel 9. Gini Ratio Menurut Klasifikasi Daerah, Provinsi Bali Tahun 2013.

Klasifikasi Daerah		<i>Gini Ratio</i>
(1)		(2)
Perkotaan		0,408
Perdesaan		0,335
Bali	2013	0,403
	2012 ^R	0,430
	2011 ^R	0,410

Sumber: BPS, Susenas 2013.

Jika dibandingkan menurut klasifikasi daerah, kesenjangan pendapatan di daerah perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan di daerah perdesaan, yaitu sebesar 0,408 untuk indeks gini rasio perkotaan dan 0,335 untuk perdesaan. Semakin tinggi tingkat gini ratio suatu wilayah mencerminkan semakin tinggi pula ketimpangan pendapatan yang terjadi di antara penduduk daerah tersebut.

Lebih tingginya nilai indeks gini rasio di perkotaan lebih disebabkan karena sifat penduduk perkotaan yang lebih majemuk dan beragam, baik dari segi jenis pekerjaan, status ekonomi, hingga pendapatan yang mereka peroleh. Berfluktuasinya pendapatan penduduk di perkotaan disebabkan adanya rentang perbedaan pendapatan yang sangat mencolok antara penduduk yang berpendapatan rendah dengan penduduk berpendapatan tinggi. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan di masyarakat perkotaan. Namun, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab ketimpangan pendapatan secara mendalam dibutuhkan adanya suatu kajian lebih lanjut.

Berdasarkan Tabel 10 di bawah ini, dapat diketahui persentase pendapatan yang diterima oleh masing-masing kelompok pendapatan penduduk. Sejalan dengan nilai gini ratio, hasil penghitungan menurut kriteria Bank Dunia juga memperlihatkan bahwa tingkat kesenjangan pendapatan di Provinsi Bali sudah masuk dalam kategori menengah.

Bank Dunia memfokuskan perhatian pada perkembangan pendapatan yang diperoleh oleh penduduk yang termasuk dalam 40 persen penduduk berpendapatan rendah. Pada tahun 2012, kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima kurang dari 17 persen jumlah total pendapatan, yaitu sebesar 16,21 persen, sedangkan pada tahun 2013 menjadi 16,32 persen. Dengan kata lain, Bali masih berada pada kategori ketimpangan menengah (pemerataan sedang).

Tabel 10. Distribusi Pendapatan Menurut Klasifikasi Daerah dan Kriteria Bank Dunia, Provinsi Bali Tahun 2013.

Klasifikasi Daerah	Kelompok Pendapatan			
	40% penduduk berpendapatan rendah	40% penduduk berpendapatan menengah	20% penduduk berpendapatan tinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Perkotaan	15,53	37,81	46,66	
Perdesaan	19,54	39,17	41,28	
Bali	2013	16,32	36,77	46,91
	2012	16,21	35,67	48,11

Sumber: BPS, Susenas 2013.

Berdasarkan Tabel 10, pada tahun 2013 tingkat pemerataan pendapatan di daerah perdesaan lebih tinggi dibanding daerah perkotaan, kecuali pada kelompok 20% penduduk berpendapatan tinggi. Dengan kata

lain, ketimpangan pendapatan di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan untuk kelompok pendapatan 40 persen penduduk berpendapatan rendah dan 40 persen penduduk berpendapatan menengah. Hal ini terlihat dari lebih besarnya porsi pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah dan 40 persen penduduk berpendapatan menengah di perdesaan dibanding di perkotaan. Jumlah pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah di perdesaan mencapai 19,54 persen (masuk kategori ketimpangan rendah karena di atas 17 persen), jauh lebih tinggi dibanding porsi pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah di perkotaan yang hanya 15,53 persen (masuk kategori sedang).

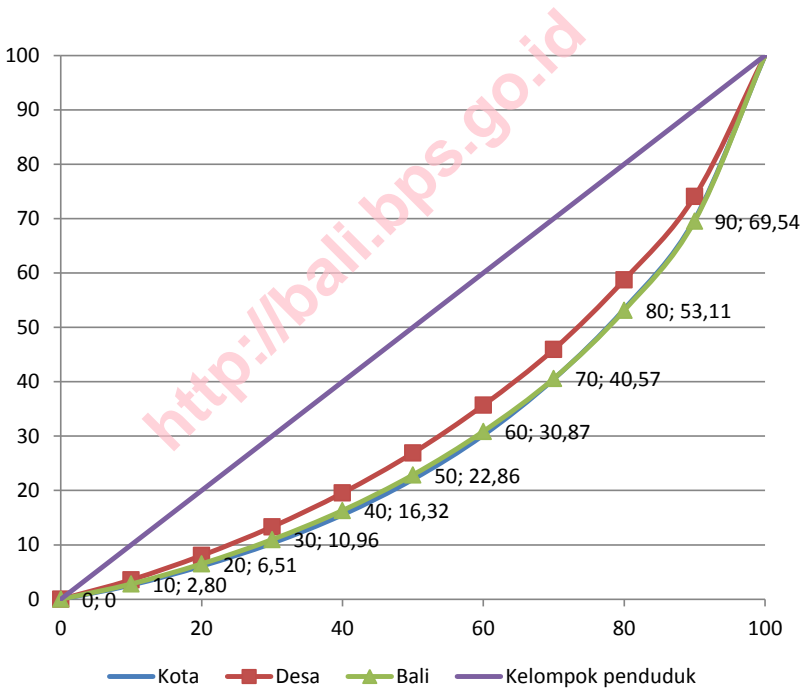
Sebagai pendukung dari kedua metode di atas, tingkat kesenjangan ekonomi di Provinsi Bali dapat divisualisasikan melalui Kurva Lorenz seperti terlihat pada Gambar 6. Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan suatu wilayah secara kumulatif. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkat yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan wilayah, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurva Lorenz menunjukkan bahwa garis yang mendekati garis diagonal dikatakan memiliki karakteristik pembagian pendapatan yang lebih merata.

Sejalan dengan dua hasil penghitungan sebelumnya, tingkat pemerataan pendapatan di daerah perdesaan memang sudah lebih baik dibandingkan daerah perkotaan. Hal ini tercermin dari garis distribusi pendapatan daerah perdesaan yang lebih mendekati garis diagonal dibandingkan garis distribusi pendapatan daerah perkotaan.

Menurut beberapa pendapat, salah satu penyebab ketidakmerataan pendapatan adalah memekanisme pasar ekonomi yang ada sekarang ini. Mekanisme ini menyebabkan daerah-daerah yang relatif sudah maju, dalam

hal ini perkotaan, akan semakin cepat pertumbuhannya. Sementara itu, tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang kurang maju (perdesaan) cenderung lebih lambat. Hal inilah yang memicu timbulnya ketimpangan tersebut sehingga diperlukan suatu perencanaan dan kebijakan dalam mengarahkan jalannya pembangunan yang lebih berimbang di seluruh wilayah.

Gambar 6. Distribusi Pendapatan Menurut Klasifikasi Daerah, Provinsi Bali Tahun 2013.



Sumber: BPS, Susenas 2013.

4.3.2 Distribusi Pendapatan Menurut Kabupaten/Kota.

Meskipun secara administratif wilayah Provinsi Bali terbagi menjadi delapan kabupaten dan satu kotamadya, pemerintah sangat mengupayakan pembangunan dapat berjalan secara merata sehingga diharapkan hasil-hasil

pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat sampai ke pelosok daerah. Untuk mencapai pemerataan tersebut ternyata bukanlah persoalan yang sederhana. Diperlukan strategi-strategi pembangunan yang tepat sasaran dan berkesinambungan.

Pemahaman mengenai tingkat kesenjangan ekonomi di tingkat regional tentu sangat penting bagi perencanaan pembangunan di masa mendatang. Dengan perencanaan pembangunan yang terarah, tentu diharapkan hasil-hasil pembangunan yang lebih optimal.

Secara umum, gini ratio pada tahun 2013 di masing-masing kabupaten/kota lebih rendah dibanding nilai gini ratio untuk Provinsi Bali yang mencapai 0,403. Masih tingginya gini ratio provinsi menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Pada Tabel 11 dapat dilihat perbandingan gini ratio di masing-masing kabupaten/kota dalam kurun waktu tahun 2011 hingga 2013. Pergerakan nilai indeks gini ratio dari tahun 2012 ke tahun 2013 sangat beragam. Ada beberapa wilayah yang berubah status ketimpangan pendapatannya, yaitu dari kategori rendah (di bawah 0,35) menjadi kategori sedang (antara 0,35—0,50), diantaranya adalah Kabupaten Tabanan, Klungkung, dan Buleleng. Sementara wilayah lainnya tetap, kecuali Kota Denpasar berubah status dari kategori tinggi (di atas 0,50) ke kategori sedang (antara 0,35—0,50), yaitu dari 0,425 di tahun 2012 menjadi 0,364 di tahun 2013.

Tabel 11. Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2011—2013.

Kabupaten/Kota	<i>Gini Ratio</i>		
	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
Jembrana	0,402	0,371	0,371
Tabanan	0,365	0,347	0,386
Badung	0,339	0,326	0,347
Gianyar	0,328	0,336	0,325
Klungkung	0,378	0,347	0,360
Bangli	0,268	0,305	0,307
Karangasem	0,292	0,288	0,329
Buleleng	0,343	0,333	0,376
Denpasar	0,340	0,425	0,364
Bali	0,410	0,430	0,403

Sumber: BPS, Susenas 2011—2013.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa makin beragam dan majemuknya kondisi sosial ekonomi suatu wilayah dapat memberi pengaruh pada terjadinya ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut. Kenaikan gini ratio yang terjadi di Kabupaten Tabanan, Klungkung, dan Buleleng menunjukkan adanya peningkatan kesenjangan di daerah ini. Artinya, pemerataan hasil pembangunan kurang berhasil. Hal ini dapat juga disebabkan karena sangat bervariasinya peluang/kesempatan untuk meningkatkan pendapatan, mulai dari kesempatan peningkatan pendapatan yang sangat signifikan maupun kesempatan peningkatan pendapatan yang

tidak signifikan, semua lebih banyak terjadi di ketiga wilayah tersebut dibandingkan di daerah lain.

Tabel 12. Distribusi Pendapatan Menurut Kabupaten/Kota dan Kriteria Bank Dunia, Provinsi Bali Tahun 2011 dan 2013.

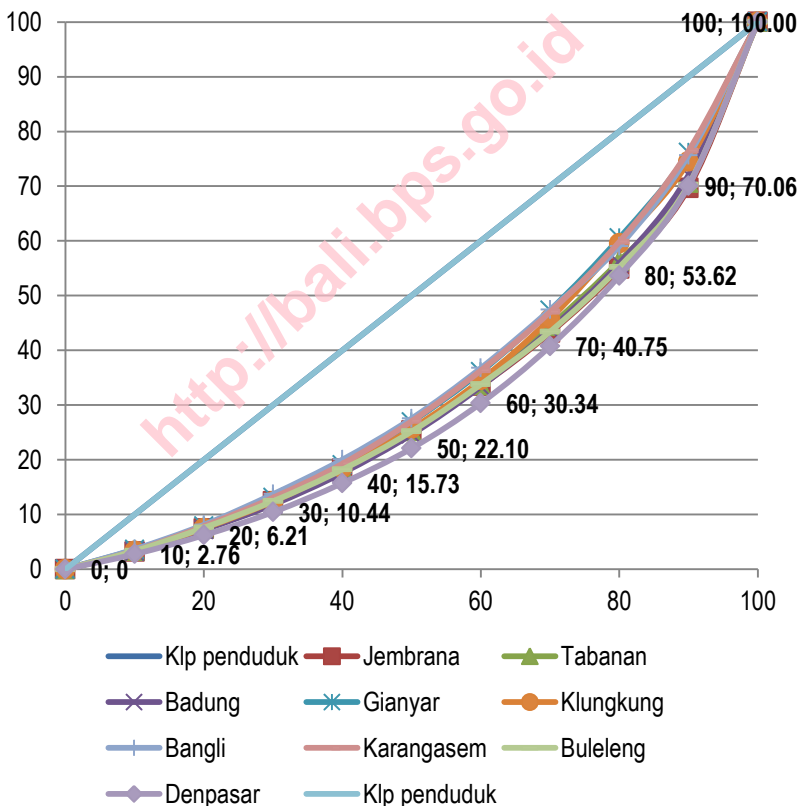
Kabupaten/Kota	Distribusi Pendapatan								
	40% penduduk berpendapatan rendah			40 % penduduk berpendapatan sedang			20 % penduduk berpendapatan tinggi		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Jembrana	18,16	18,85	19,84	31,38	33,97	33,96	50,44	47,18	46,20
Tabanan	18,59	19,05	17,87	35,82	37,19	35,79	45,58	43,76	46,34
Badung	19,19	19,75	19,29	38,50	39,17	38,45	42,30	41,08	42,26
Gianyar	20,25	19,59	19,95	37,44	38,10	39,42	42,30	42,32	40,62
Klungkung	17,37	19,07	19,15	37,22	37,49	36,10	45,40	43,44	44,75
Bangli	23,81	21,60	21,67	38,56	37,69	38,16	37,61	40,71	40,17
Karangasem	22,12	23,12	20,65	38,62	36,96	36,90	39,24	39,92	42,45
Buleleng	20,09	20,27	18,80	35,73	36,79	35,31	44,16	42,94	45,89
Denpasar	18,66	16,08	17,60	39,85	33,12	39,51	41,47	50,80	42,88
Bali	17,20	16,21	16,32	36,37	35,67	36,77	46,42	48,11	46,91

Sumber: BPS, Susenas 2011—2013.

Gambaran mengenai tingkat kesenjangan penduduk di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali berdasarkan kriteria Bank Dunia dapat dilihat pada Tabel 12. Terlihat pada tabel bahwa 40 persen penduduk berpendapatan rendah di seluruh kabupaten/kota pada tahun 2013 rata-rata sudah menerima lebih dari 17 persen jumlah pendapatan di daerahnya. Artinya, distribusi pendapatan di wilayah tersebut berada pada kategori ketimpangan rendah.

Meskipun secara rata-rata hampir seluruh wilayah kabupaten/kota di Bali masih dalam kategori ketimpangan rendah, namun kondisi ini tetap harus diwaspadai mengingat nilai persentasenya yang berfluktuasi. Keadaan yang harus dijaga adalah jangan sampai persentase ini terus menurun yang berarti mendekati atau bahkan di bawah ambang batas minimal 17 persen.

Gambar 7. Distribusi Pendapatan Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2013.



Sumber: BPS, Susenas 2013.

Perbedaan ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah disebabkan oleh pertumbuhan dan keterbatasan yang dimiliki masing-masing daerah berbeda-beda serta pembangunan yang cenderung terpusat pada daerah yang sudah maju saja. Hal inilah yang menjadi penyebab timbulnya ketimpangan distribusi pendapatan dan merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya ketimpangan yang semakin lebar.

Visualisasi distribusi pendapatan masing-masing kabupaten/kota pada tahun 2013 ditunjukkan oleh Kurva Lorenz pada Gambar 7. Sejalan dengan nilai gini ratio dan kriteria Bank Dunia, distribusi pendapatan Kabupaten Gianyar memiliki garis yang paling mendekati garis diagonal sedangkan garis yang paling jauh dari garis diagonal adalah garis distribusi pendapatan Kota Denpasar.

BAB V

PENUTUP

Dapat disimpulkan beberapa hal penting untuk menjadi bahan evaluasi pembangunan di Provinsi Bali, diantaranya

1. Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Provinsi Bali pada tahun 2013 mencapai Rp.994.070,00 mengalami kenaikan sebesar 9,03 persen dibandingkan tahun 2012. Kota Denpasar menempati urutan teratas dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduknya mencapai Rp.1.474.889,00. Sebaliknya, Kabupaten Karangasem memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan terendah, yaitu sebesar Rp.557.906,00.
2. Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk di daerah perkotaan mencapai Rp.1.167.282,00 sedangkan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk di daerah perdesaan hanya Rp.728.744.
3. Pada tahun 2013, secara umum tidak ada perubahan pola konsumsi penduduk Provinsi Bali. Proporsi terbesar pengeluaran penduduk digunakan untuk konsumsi non makanan, yaitu mencapai 57,53 persen, sedangkan sisanya sebesar 42,47 persen digunakan untuk konsumsi makanan.
4. Pada tahun 2013, nilai gini ratio Provinsi Bali 0,403, dengan ketimpangan yang lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan daerah perdesaan.
5. Pergerakan nilai indeks gini ratio dari tahun 2012 ke tahun 2013 sangat beragam. Ada beberapa wilayah yang berubah status ketimpangan pendapatannya, yaitu dari kategori rendah (di bawah 0,35) menjadi kategori sedang (antara 0,35—0,50), diantaranya

adalah Kabupaten Tabanan, Klungkung, dan Buleleng. Sementara wilayah lainnya tetap, kecuali Kota Denpasar berubah status dari kategori tinggi (di atas 0,50) ke kategori sedang (antara 0,35—0,50), yaitu dari 0,425 di tahun 2012 menjadi 0,364 di tahun 2013.

<http://bali.bps.go.id>

LAMPIRAN

<http://bali.bps.go.id>

Tabel 13. Rata-Rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pengeluaran, Provinsi Bali Tahun 2013.

Kabupaten/Kota	Makanan		Non Makanan		Total (Rupiah)	
	(Rupiah)	(%)	(Rupiah)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Jembrana	311.848	48,15	335.855	51,85	647.703	
Tabanan	406.732	44,52	506.906	55,48	913.638	
Badung	504.576	37,89	827.250	62,11	1.331.826	
Gianyar	389.460	40,58	570.194	59,42	959.654	
Klungkung	358.910	49,89	360.510	50,11	719.420	
Bangli	307.578	50,03	307.183	49,97	614.761	
Karangasem	302.525	54,23	255.381	45,77	557.906	
Buleleng	354.023	47,65	388.892	52,35	742.915	
Denpasar	576.065	39,06	898.824	60,94	1.474.889	
Bali	2013	422.190	42,47	571.880	57,53	994.070
	2012	365.936	40,14	545.788	59,86	911.724

Sumber: BPS, Susenas 2013.

Tabel 14. Rata-Rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran, Kabupaten Jembrana Tahun 2013.

Kelompok Pendapatan Penduduk	Makanan		Non Makanan		Total (Rupiah)	
	(Rupiah)	(%)	(Rupiah)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
40% penduduk berpendapatan rendah	196.290	61,20	124.452	38,80	320.742	
40% penduduk berpendapatan menengah	307.795	55,87	243.112	44,13	550.907	
20% penduduk berpendapatan tinggi	551.462	36,86	944.540	63,14	1.496.002	
Total	2013	311.848	48,15	335.855	51,85	647.703
	2012	321.170	45,75	380.855	54,25	702.025

Sumber: BPS, Susenas 2013.

Tabel 15. Rata-Rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran, Kabupaten Tabanan Tahun 2013.

Kelompok Pendapatan Penduduk	Makanan		Non Makanan		Total (Rupiah)	
	(Rupiah)	(%)	(Rupiah)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
40% penduduk berpendapatan rendah	250.129	61,38	157.395	38,62	407.524	
40% penduduk berpendapatan menengah	429.296	52,37	390.436	47,63	819.732	
20% penduduk berpendapatan tinggi	674.818	31,95	1.437.189	68,05	2.112.007	
Total	2013	406.732	44,52	506.906	55,48	913.638
	2012	363.998	44,42	461.667	55,58	830.665

Sumber: BPS, Susenas 2013.

Tabel 16. Rata-Rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran, Kabupaten Badung Tahun 2013.

Kelompok Pendapatan Penduduk	Makanan		Non Makanan		Total (Rupiah)	
	(Rupiah)	(%)	(Rupiah)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
40% penduduk berpendapatan rendah	328.443	51,20	313.093	48,80	641.536	
40% penduduk berpendapatan menengah	533.716	41,66	747.340	58,34	1.281.056	
20% penduduk berpendapatan tinggi	799.203	28,38	2.017.310	71,62	2.816.513	
Total	2013	504.576	37,89	827.250	62,11	1.331.826
	2012	483.372	39,89	728.313	60,11	1.211.685

Sumber: BPS, Susenas 2013.

Tabel 17. Rata-Rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran, Kabupaten Gianyar Tahun 2013.

Kelompok Pendapatan Penduduk	Makanan		Non Makanan		Total (Rupiah)	
	(Rupiah)	(%)	(Rupiah)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
40% penduduk berpendapatan rendah	249.062	51,97	230.156	48,03	479.218	
40% penduduk berpendapatan menengah	408.126	43,30	534.380	56,70	942.506	
20% penduduk berpendapatan tinggi	633.726	32,35	1.325.237	67,65	1.958.963	
Total	2013	389.460	40,58	570.194	59,42	959.654
	2012	373.502	37,24	629.403	62,76	1.002.905

Sumber: BPS, Susenas 2013.

Tabel 18. Rata-Rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran, Kabupaten Klungkung Tahun 2013.

Kelompok Pendapatan Penduduk	Makanan		Non Makanan		Total (Rupiah)	
	(Rupiah)	(%)	(Rupiah)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
40% penduduk berpendapatan rendah	213.848	61,79	132.251	38,21	346.099	
40% penduduk berpendapatan menengah	356.287	55,16	289.599	44,84	645.886	
20% penduduk berpendapatan tinggi	652.995	40,54	957.611	59,46	1.610.606	
Total	2013	358.910	49,89	360.510	50,11	719.420
	2012	346.795	49,89	348.292	50,11	695.087

Sumber: BPS, Susenas 2013.

Tabel 19. Rata-Rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran, Kabupaten Bangli Tahun 2013.

Kelompok Pendapatan Penduduk	Makanan		Non Makanan		Total (Rupiah)	
	(Rupiah)	(%)	(Rupiah)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
40% penduduk berpendapatan rendah	208.711	62,61	124.629	37,39	333.340	
40% penduduk berpendapatan menengah	311.971	53,21	274.309	46,79	586.280	
20% penduduk berpendapatan tinggi	496.083	40,23	737.148	59,77	1.233.231	
Total	2013	307.578	50,03	307.183	49,97	614.761
	2012	284.204	50,36	280.102	49,64	564.306

Sumber: BPS, Susenas 2013.

Tabel 20. Rata-Rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran, Kabupaten Karangasem Tahun 2013.

Kelompok Pendapatan Penduduk	Makanan		Non Makanan		Total (Rupiah)	
	(Rupiah)	(%)	(Rupiah)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
40% penduduk berpendapatan rendah	182.855	63,32	105.915	36,68	288.770	
40% penduduk berpendapatan menengah	299.482	58,14	215.594	41,86	515.076	
20% penduduk berpendapatan tinggi	545.780	46,39	630.645	53,61	1.176.425	
Total	2013	302.525	54,23	255.381	45,77	557.906
	2012	245.940	54,99	201.281	45,01	447.221

Sumber: BPS, Susenas 2013.

Tabel 21. Rata-Rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran, Kabupaten Buleleng Tahun 2013.

Kelompok Pendapatan Penduduk	Makanan		Non Makanan		Total (Rupiah)	
	(Rupiah)	(%)	(Rupiah)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
40% penduduk berpendapatan rendah	218.165	62,35	131.737	37,65	349.902	
40% penduduk berpendapatan menengah	356.317	54,46	297.915	45,54	654.232	
20% penduduk berpendapatan tinggi	620.628	36,39	1.084.703	63,61	1.705.331	
Total	2013	354.023	47,65	388.892	52,35	742.915
	2012	291.180	49,05	302.447	50,95	593.627

Sumber: BPS, Susenas 2013.

Tabel 22. Rata-Rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran, Kota Denpasar Tahun 2013.

Kelompok Pendapatan Penduduk	Makanan		Non Makanan		Total (Rupiah)	
	(Rupiah)	(%)	(Rupiah)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
40% penduduk berpendapatan rendah	335.244	51,66	313.639	48,34	648.883	
40% penduduk berpendapatan menengah	634.428	43,56	822.099	56,44	1.456.527	
20% penduduk berpendapatan tinggi	941.613	29,74	2.224.907	70,26	3.166.520	
Total	2013	576.065	39,06	898.824	60,94	1.474.889
	2012	432.348	31,75	929.557	68,25	1.361.905

Sumber: BPS, Susenas 2013.

Tabel 23. Rata-Rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Jenis Kelompok Komoditi Makanan, Provinsi Bali Tahun 2013.

Kelompok Komoditi	Makanan	
	(Rupiah)	(%)
-1	-2	-3
Padi-padian	67.233	15,92
Umb-umbian	2.488	0,59
Ikan	20.054	4,75
Daging	23.888	5,66
Telur dan Susu	24.207	5,73
Sayur-sayuran	32.984	7,81
Kacang-kacangan	9.470	2,24
Buah-buahan	19.317	4,58
Minyak dan Lemak	10.938	2,59
Bahan Minuman	11.752	2,78
Bumbu-bumbuan	6.364	1,51
Konsumsi Lainnya	5.942	1,41
Makanan dan Minuman Jadi	150.708	35,70
Tembakau dan sirih	36.843	8,73

Sumber: BPS, Susenas 2013.

Tabel 24. Rata-Rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Jenis Kelompok Komoditi Non Makanan, Provinsi Bali Tahun 2013.

Kelompok Komoditi	Non Makanan	
	(Rupiah)	(%)
-1	-2	-3
Sewa, kontrak, perkiraan sewa rumah	148.864	26,03
Pemeliharaan dan perbaikan ringan rumah	7.486	1,31
Listrik, air, minyak tanah, kayu bakar	45.284	7,92
Rekening telepon rumah, dll	29.627	5,18
Sabun mandi/cuci, kosmetik, dll	26.747	4,68
Biaya kesehatan	42.948	7,51
Biaya pendidikan	42.743	7,47
Transportasi, bensin, dll	62.522	10,93
Jasa lainnya	9.358	1,64
Pakain, alas kaki, dli	22.839	3,99
Barang tahan lama	57.279	10,02
Pajak	11.555	2,02
Pungutan	5.039	0,88
asuransi kesehatan	6.310	1,10
Asuransi lainnya	3.547	0,62
Keperluan pesta dan upacara	49.733	8,70

Sumber: BPS, Susenas 2013.

Tabel 25. Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita Sehari Menurut Kelompok Bahan Makanan, Provinsi Bali Tahun 2011–2013.

Kelompok Bahan Makanan	Kalori (Kkal)			Protein (gr)		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Padi-padian	1.046,00	1.014,23	991,09	24,48	23,75	23,19
Umbi-umbian	32,10	20,63	21,35	0,29	0,20	0,20
Ikan	29,02	35,07	29,00	5,05	6,07	5,08
Daging	111,81	81,64	95,41	5,86	4,43	5,10
Telur dan Susu	45,00	47,48	50,68	2,92	3,09	3,23
Sayur-sayuran	44,18	45,75	38,58	2,98	3,02	2,60
Kacang-kacangan	58,49	57,63	52,00	5,24	5,29	4,83
Buah-buahan	59,73	45,49	61,04	0,57	0,47	0,60
Minyak dan Lemak	214,80	208,38	204,54	0,23	0,15	0,17
Bahan Minuman	76,04	65,85	67,06	1,09	1,00	1,12
Bumbu-bumbuan	11,86	11,71	10,42	0,64	0,58	0,56
Konsumsi Lainnya	42,34	40,52	42,25	0,88	0,83	0,91
Makanan dan Minuman Jadi	360,40	344,41	393,36	11,41	11,25	12,81
Jumlah	2.131,77	2.018,84	2.056,78	61,64	60,13	60,40

Sumber: BPS, Susenas 2013.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Jl. Raya Puputan No. 1 Renon Denpasar 80226

Telp. (0361) 238159, Fax. (0361) 238162

Homepage: <http://bali.bps.go.id>

E-mail: bps5100@bps.go.id

ISSN 2356-4652

